

**STRATEGI PELAKSANAAN PILKADES BERBASIS
E-Voting DI KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Udaya Madjid¹
Layla Kurniawati²
Indri Susiamti³

*^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang, Jawa Barat
45363*

Alamat email Koresponden: udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study analyses the implementation of e-voting in village head elections in Sleman Regency. to identify the factors causing opposition, and to observe and formulated strategiest to be implemented by the Departement of Community and Village Empowerment of Sleman Regency. Data collection methods for this research include nterviews, observations, and gathering documents related to the implementation of E-Voting based village head elections in Sleman Regency.

The results of this research indicate that the role of the Department of Community and Village Empowerment as a leading sector in the E-Voting based village head elections in Sleman Regency has been quite effective. The causes of opposition include public concerns about the adoption of the new technology as a votting method and issues related to data security and privacy. These concerns dominate the resistance to this technology in village head elections, as they relate to vote counts that will affect each candidate pair. The influencing factors consist of internal and external factors, followed by the determination of strategies for success based on SWOT analysis and litmust tests. The strategic issues identified include optimizing the high technology acceptance rate in Sleman Regency to conduct program socialization and various governmental activities related to technology implementation.

Keyword: *Strategy, Head Village Election, E-Voting*

PENDAHULUAN

Studi ini berfokus pada munculnya resistensi terhadap penerapan teknologi dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Adanya perkembangan dan keterbukaan informasi teknologi terhadap program dan sistem pemerintahan yang ada, maka kepercayaan masyarakat juga turut meningkat seiring dengan hal tersebut. Berbicara mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten termaju di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) pada Tahun 2018, Sleman merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi dengan IP-TIK tertinggi kedua di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan pada tingginya angka IP-TIK di Kabupaten Sleman, maka sudah selayaknya Kabupaten Sleman menerapkan konsep Smart City dalam pelaksanaan tata pemerintahannya.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari diterapkannya Smart City di Kabupaten Sleman yaitu. khususnya pada elemen Smart Governance, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 dengan berbasis metode E-Voting. E-Voting adalah suatu metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu kegiatan pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan E-Voting Pilkades di Kabupaten Sleman adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik.

Pemilihan kepala desa secara elektronik merupakan hal yang baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten pertama yang menerapkan sistem tersebut, dalam proses persiapan juga pengenalannya kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) untuk menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi E-Voting kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Leading sector dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa berbasis E-Voting ini, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) berperan untuk mengatur dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades. begitupun dengan teknis terkait pelaksanaannya, termasuk penghitungan suara akhir yang dipegang perannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Sebagai salah satu cara baru dalam pemberian suara di pilkades, mekanisme E-Voting ini sempat menimbulkan goncangan tertentu di masyarakat. Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbasis E-Voting di Kabupaten Sleman ini sempat menuai protes dari puluhan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Sleman “Manikwoyo” mendatangi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. untuk menyampaikan aspirasi menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Sleman dengan sistem elektronik atau E-Voting. Alasan penolakan terhadap penerapan elektronik voting juga beragam. diantaranya yaitu kekhawatiran terkait munculnya penerapan teknologi, hingga tata nilai regulasi yang belum kuat untuk menindak bila suatu waktu terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan E-Voting tersebut. Resistensi tersebut berupa penolakan sekelompok masyarakat (paguyuban kepala desa) terhadap rencana pelaksanaan pilkades berbasis E-Voting merujuk pada sistem pemungutan suara yang tidak menggunakan kertas. hal tersebut kemudian dianggap tidak sesuai dengan asas pemilihan umum. Berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. hal ini kemudian

menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, yaitu : Apa saja faktor yang menjadi penyebab munculnya resistensi tersebut dan bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan pilkades berbasis E-Voting pertama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. data-data yang dikumpulkan berupa keterangan yang diperoleh dari informan yang berada di lokasi penelitian, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintahan setempat, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta Dinas Komunikasi dan Informatika, selaku pelaku dan pelaksana kegiatan Pilkades berbasis E-Voting ini. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sleman sebagai unit penelitian. sedangkan untuk mengidentifikasi munculnya faktor-faktor penolakan masyarakat terhadap kebijakan pilkades metode E-Voting tersebut, penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi key person, dari beberapa desa yang melaksanakan E-Voting pilkades dengan karakteristik desa yang berada di daerah termaju di Kabupaten Sleman.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. yaitu data yang langsung didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap informan di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari kajian referensi dan literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, serta informasi dari media baik cetak dan elektronik. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini. kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan analisa data yang melalui prosedur mengolah, membaca, menggambarkan, mengklasifikasi, menginterpretasi dan menyajikan data (Creswell, J. W. (2017)).

KERANGKA TEORI

Guna mendapatkan rujukan literasi yang lebih relevan terkait resistensi terhadap suatu kebijakan dan strategi terlaksananya Pilkada berbasis E-Voting. Dalam bab ini akan dipaparkan konsep resistensi dan konsep strategi pelaksanaan sebuah kegiatan.

Marunduh (2004) dan Atmadja (2006) mengungkapkan bahwa resistensi terhadap suatu kebijakan muncul karena beberapa faktor. diantaranya faktor budaya (adanya tatanan norma dalam masyarakat yang tidak dipatuhi), kualitas SDM dan komunikasi. Kemudian dari sisi ekonomi. Kautsary (2005) dan Pamungkas (2007) menyimpulkan bahwa resistensi dapat terjadi disebabkan karena keterbatasan informasi, ancaman terhadap ekonomi, kurangnya sosialisasi dan koordinasi juga intrust terhadap kinerja birokrasi. Adapun resistensi terhadap pemanfaatan teknologi E-Voting, disebabkan beberapa hal. Cheeseman dkk (2018) mengungkapkan bahwa peluang untuk melakukan praktik korupsi lebih besar. besarnya biaya yang dibutuhkan untuk ketersediaan alat, inefektivitas E-Voting yang cenderung lebih tinggi karena SDM yang tersedia di negara berkembang belum memadai, yang kemudian menjadikan sistem E-Voting ini dapat menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, salah satunya yaitu penolakan.

Faktor-faktor penghambat tersebut, sejalan dengan lima dimensi yang menjadi fenomena penyebab penolakan, diungkapkan oleh (Robbins, 2008) yaitu :

1. Ketidakpastian terhadap perubahan, adalah kondisi yang tidak pasti terkait tugas, peran, ataupun harapan yang kemudian dapat menciptakan kecemasan dan penolakan.
2. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Minimnya kemampuan yang dimiliki, khususnya yang berkaitan dengan tingkat edukasi

masing-masing individu juga dapat menimbulkan penolakan terhadap sebuah perubahan. Hal ini karena perubahan itu sendiri sulit untuk diterima karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan.

3. Ketakutan akan penggantian pekerjaan oleh teknologi. Munculnya persepsi akan tergantikannya profesi dengan teknologi yang mulai diterapkan. Mengingat kemajuan teknologi saat ini, bukanlah hal yang tidak mungkin bila beberapa pekerjaan khususnya yang erat kaitannya dengan administrasi akan perlahan digantikan dengan keberadaan teknologi yang ada.
4. Tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan pribadi, penolakan dapat timbul jika nilai atau kebutuhan individu tidak sejalan dengan nilai dan kebutuhan suatu organisasi.
5. Ketidakpastian terkait privasi dan keamanan. Diterapkannya sebuah inovasi pembaharuan atau perubahan juga tak lepas dari kekhawatiran akan tingkat keamanan yang tersedia. Hal ini merupakan kekhawatiran yang sering muncul karena penerapan teknologi dianggap cukup mudah untuk disabotase, karena masyarakat tidak dapat melihat langsung prosesnya secara kasat mata.

Kelima faktor penghambat tersebut penulis jadikan landasan awal tinjauan literasi, untuk mengetahui secara umum penyebab penolakan yang terjadi ditengah masyarakat dalam penerapan Pilkadaes berbasis E-Voting di Kabupaten Sleman.

Adapun untuk mengetahui strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan pilkades berbasis E-Voting yang mana sempat menuai penolakan ini, penulis merujuk pada konsep Analisa SWOT, yang secara sistematis mengidentifikasi berbagai faktor-

faktor guna menentukan strategi yang efektif, dengan memaksimalkan kelemahan dan ancaman yang ada dan mengkombinasikannya dengan kekuatan dan peluang yang juga saling beriring.

PEMBAHASAN

1. Faktor Munculnya Penolakan

Hasil pengumpulan data terkait dengan faktor penolakan pelaksanaan pilkades metode E-Voting ini menunjukkan bahwa dari dua subjek, yaitu masyarakat awam dan tokoh masyarakat – penolakan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Masyarakat awam pada umumnya tidak menolak penerapan kebijakan E-Voting dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Sleman ini. mereka juga menyadari fakta bahwa kemajuan teknologi yang ada saat ini mulai mendominasi hingga ke sektor pemerintahan, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Paradigma ini juga sejalan dengan tingginya angka IP-TIK yang diraih oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2018 lalu oleh survey BPS. Metode ini dapat diterima, asalkan sosialisasi dan implementasi terkait sistem ini dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga meminimalisir potensi kecurangan maupun kesalahan yang dapat dilakukan.
- 2) Beberapa dari tokoh masyarakat berpendapat bahwa penolakan yang sempat dilayangkan para kepala desa yang mayoritasnya incumbent ini menolak kebijakan tersebut tidak lain karena munculnya kekhawatiran tidak mampu memenangkan Kembali kontestasi poltik tingkat desa ini. Hadirnya metode E-Voting pada pilkades serentak di Kabupaten Sleman ini juga menimbulkan kemungkinan tertutupnya akses “fasilitas” yang selama ini diterima oleh para incumbent tersebut. sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali ajang pemilihan berlangsung, para kandidat juga memiliki “sumber daya” yang mendukung pencalonannya untuk memenangkan kontestasi politik ini.

Berdasarkan hasil analisa terhadap faktor pendorong munculnya penolakan diterapkannya Pilkades metode E-Voting di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin yaitu:

- A. Keyakinan bahwa menghadapi perubahan adalah sebuah kesulitan dan ketidakmampuan menggunakan teknologi yang baru. keyakinan ini dibangun berdasar pada asumsi terhadap dua kelompok masyarakat, yaitu lansia dan kaum tunanetra. Diterapkannya metode ini dikhawatirkan akan membuat kaum lansia dan tunanetra tidak dapat berpartisipasi. karena kesulitan untuk menerima pola perubahan sistem pemilihan dan juga belum tersedianya fasilitas huruf braile bagi penyandang tunanetra.
- B. Anggapan bahwa teknologi dapat mengancam pekerjaan. sebenarnya ini adalah kekhawatiran yang dirasa terlalu dini kemunculannya, karena sejauh ini yang baru diterapkan adalah pola pemilihannya, bukan langsung merujuk pada implementasi kinerjanya. Sistem pemerintahan adalah sebuah bentuk pelayanan, dan anggapan pelayanan hanya dapat dilakukan oleh manusia tampaknya masih sangat kuat terpatri dalam paradigma ini.
- C. Rusaknya tatanan nilai karena sebuah regulasi. asas rahasia yang menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu, merupakan masalah yang kerap terjadi pada negara-negara yang menerapkan E-Voting sebagai metodenya. Sedangkan permasalahan mendasar pada sistem tersebut adalah bagaimana menjaga kerahasiaan pilihan voter yang sudah diberikan dan tetap dihitung oleh sistem sebagai suara yang sah.
- D. Kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi. transisi proses pemilihan yang selama ini dilakukan tentu akan memberikan sedikit efek 'beda' dalam pelaksanaannya, karena sebelumnya terbiasa dilakukan secara nyata dan dapat dirasakan keberadaannya tapi kini, semua dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi yang mana ini dalam konteks tidak kasat mata, dalam hal ini adalah suara yang dihasilkan. Kekhawatiran yang diungkapkan oleh salah satu calon kepala desa ini. seringkali terjadi selama masa perpindahan atau pergantian sebuah metode, namun kemudian keresahan tersebut dapat dipatahkan dengan solusi yang kemudian ditawarkan oleh pihak penyelenggara kebijakan (Pemerintah Kabupaten Sleman)

guna mempertanggung jawabkan sistem yang akan diterapkan, sekaligus menjamin keamanannya.

2. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan E-Voting Pilkadaes Serentak

Munculnya respon penolakan yang dilayangkan oleh sekelompok masyarakat terhadap rencana kebijakan penerapan E-Voting Pilkadaes di Kabupaten Sleman lalu. kemudian memunculkan keingintahuan penulis untuk mengamati strategi seperti apa yang diterapkan agar sistem tetap berjalan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di lapangan, baik faktor pendukung maupun ancamannya. Adapun faktor yang dapat dilihat dalam dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

- a. Kekuatan. merupakan salah satu faktor internal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan kebijakan ini, Adapun hal tersebut adalah memang sesuatu yang sudah dipersiapkan dan dipertimbangkan penerapannya yaitu berupa, landasan hukum pelaksanaan kegiatan (Peraturan Bupati No 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik, komitmen dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyelenggarakan E-Voting pilkades serentak, yaitu dengan menjalin hubungan Kerjasama dengan BPPT sebagai lembaga penyelenggara penerapan teknologi juga sebagai penanggung jawab keamanan sistem yang diterapkan.
- b. Dibalik kekuatan tentu ada kelemahan yang juga dimiliki. dalam hal ini kelemahan yang harus ditanggulangi oleh penyelenggara kebijakan adalah terkait ketidakpastian akan penerapan sistem pada periode berikutnya, mengingat sumber daya yang sudah dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut tidaklah sedikit, selain itu keterbatasan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala

guna mendukung penerapan metode E-Voting Pilkades Serentak Kabupaten Sleman.

- B. Faktor Eksternal, dalam faktor ini tersusun atas dua hal yaitu peluang dan ancaman yang tercipta. Adapun kedua hal tersebut dapat dilihat dalam:
- a. Peluang. adalah kesempatan yang tercipta dalam sebuah situasi, berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan di lapangan, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu, memanfaatkan tingginya angka aksesibilitas teknologi IP-TIK yang diraih oleh Kabupaten Sleman, menjadikannya sebuah peluang untuk implementasi teknologi dalam sektor pemerintahan. Kemudian keberadaan beberapa universitas ternama Indonesia di Kabupaten Sleman juga menjadi sebuah peluang untuk menjalin kerjasama secara akademis. guna mendukung dan memperkuat landasan pelaksanaan kegiatan E-Voting Pilkades Serentak Kabupaten Sleman.
 - b. Faktor berikutnya adalah ancaman yang juga muncul, yaitu masih tingginya tingkat kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan konvensional. Hal ini terlihat dari beberapa kalangan masyarakat yang masih mengutamakan hal-hal yang bersifat nyata di depan mata. sehingga seringkali meragukan kemampuan teknologi yang cara kerjanya menggunakan sistem.

SIMPULAN

Penelitian yang berangkat pada munculnya fenomena penolakan terhadap kebijakan Pilkades Serentak berbasis E-Voting. yang dilakukan oleh kelompok kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa “Manikmoyo”. Melalui metode penulisan kualitatif deskriptif. penulis dapat memperoleh dan menjabarkan hasil yang diperoleh dari melakukan wawancara dengan informan sebagai key person, yang terdiri dari : Masyarakat awam, Masyarakat Elit (para kades) dan Tokoh Masyarakat dianggap sebagai pihak yang independente dalam eskalasi politique desa, juga sebagai tambahan data dukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor munculnya penolakan yaitu : (1) Munculnya berbagai ketakutan dan kekhawatiran, baik itu dalam menghadapi perubahan yang baru dan ketakutan akan penggunaan teknologi. (2) Ketakutan akan tergantikannya posisi pekerjaan oleh teknologi. (3) Rusaknya tatanan nilai karena sebuah regulasi yang menerapkan teknologi. (4) Kekhawatiran terkait sistem keamanan dan privasi yang akan diterapkan.

Kemudian, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan kegiatan Pilkades Serentak berbasis E-Voting ditengah munculnya penolakan tersebut, terdiri dari :

- A. Faktor Internal, kekuatan yang dimiliki melalui landasan hukum yang sudah dipersiapkan guna menjadi pijakan dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades Serentak berbasis E-Voting ini. Kemudian kelemahan yang juga muncul seiring dengan akan dilaksanakannya kegiatan adalah ketidakpastian akan diterapkannya sistem di periode yang akan datang.
- B. Faktor Eksternal yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu. tingginya angka IP-TIK yang diraih oleh Kabupaten Sleman dan keberadaan beberapa universitas ternama yang juga membuka peluang untuk menjalin kerjasama akademis terkait rencana penerapan kebijakan yang akan diterapkan yaitu Pilkades berbasis E-Voting di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan dari faktor penolakan yang ada dan strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan Pilkades Serentak berbasis E-Voting, berikut beberapa saran yang dapat penulis tawarkan, yaitu :

1. Membangun komunikasi dan interaksi yang intens dengan masyarakat terkait akan diterapkannya metode pemilihan yang baru. dalam setiap kegiatan sosialisasi terlaksana Hal ini dilakukan untuk meminimalisir percikan-percikan penolakan maupun keraguan yang mungkin saja timbul seiring penerapan metode E-Voting ini.
2. Membuat perencanaan yang baik terkait implementasi kebijakan E-Voting. dengan mempertimbangkan manfaatnya secara jangka panjang, agar dapat diperhitungkan segi keefektifan dan efisiensinya baik waktu maupun biaya yang dikeluarkan.
3. Senantiasa mempertimbangkan antara beban kerja dengan ketersediaan SDM. hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketimpangan antara pegawai satu dengan lainnya, dengan demikian diharapkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Vol. 12, 2008.
- BPS. (2018, Desember 17). *Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informai dan Komunikasi (IP-YIK)*. Retrieved Februari 12. 2020 , from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/17/1532/indeks_pembangunan-teknologi-informasi_dan-komunikasi--ip-tik--indonesia_tahun-2017-sebesar-4-99-pada-skala-0---10.html
- Bungin, B, (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Depok: Rajagrafindo Pustaka, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Chotima, Erna, Ermawati, dan A. Pramantib. (Jurnal, 2020). *Sistem E Votting Untuk Mencegah Konflik Akibat Hasil Palsu Dalam Pemilu di Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

- Darmawan, Ikhsan, Nurul, Nurhandjati, dan Evida Kartini. Memahami E Votting Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Hidayat, Fauzan. (Jurnal, 2020). Resistance To Change: Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pelaksanaan Pilkada Berbasis E-Voting di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir, A. Rahman, M. Nawawi, R. Bakri, dan B. G. Sagrim. (Jurnal, 2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya.
- Rangkuti, Freddy (2016), Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT edisi 22, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen P. (2017). Teori Organisasi Struktur Desain dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.
- Rachmawati, Desi, A. Nurjaman, dan I. T. Sihidi. (Jurnal, 2022). Implementasi E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Selotinatah, Ngariboyo District, Magetan Regency.
- Wisnaeni, Fifiana, Kushandajani, Gading P. Anggun, Sekar, dan Najib, Ahmad Ainun. (Jurnal, 2023). E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat.